

Optimalisasi Sistem Informasi Desa (Sid) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dyah Mutiarin, Sakir, dan Muhammad Eko Atmojo

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

mutiarin@yahoo.com

Abstrak

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan desa sebagai pilar utama pembangunan. Desa mendapat kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa secara otonom. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan serta mencapai tujuan pembangunan desa, pemerintah mendapat dana desa yang besar. Selain itu, pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu mengoptimalkan sistem informasi desa (SID) khususnya dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya system informasi desa maka akan sangat memudahkan pemerintah desa maupun masyarakat dalam hal pengawasan dan kontroling. Permasalahan yang dimiliki Desa Tirtoadi adalah: belum memiliki website desa sebagai media informasi dan publikasi kegiatan yang diselenggarakan oleh desa; belum memiliki media sosial sebagai media publikasi kegiatan desa dan media promosi produk berdasarkan potensi desa; dan belum memiliki Buku Profil Desa yang lengkap dan memadai. Metode atau konsep kegiatan yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah dengan beberapa langkah, yaitu: Pertama, melaksanakan forum group discussin (FGD) dengan perangkat Desa Tirtoadi. Kedua, melakukan pelatihan pengelolaan website desa sehingga bisa mendukung kegiatan pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan public yang baik.

Kata Kunci: Sistem Informasi Desa, Pelayanan Publik, dan Dana Desa

Pendahuluan

Sistem Informasi Desa (SID) adalah sistem olah data dan informasi berbasis komputer yang dapat dikelola oleh pemerintah dan komunitas desa dalam dua ranah yaitu offline dan online. SID ini merupakan sebuah aplikasi yang berbasis komputer, untuk mengelola informasi kantor desa, mendukung fungsi dan tugas kantor desa termasuk administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, pengelolaan asset desa, pengelolaan keuangan desa dan layanan publik desa. SID merupakan hal penting bagi pemerintah desa pasca disahkannya Undang-undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena SID memiliki beberapa manfaat yaitu Kantor desa lebih efisien, Kantor desa lebih efektif, Pemerintah desa lebih transparan, Pemerintah desa lebih akuntabel, Layanan publik lebih baik, Warga mendapat akses lebih baik pada informasi desa, dan Warga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan desa.

Desa Tirtoadi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIJ). Tingkat pendidikan penduduk Desa Tirtoadi adalah (1) Pendidikan sekolah dasar 1620 orang; (2) Pendidikan SMP 1555 orang; (3) Pendidikan D-1/D-2/D-3 sebanyak 341 orang; (4) Pendidikan S1, S2 dan S3 sebanyak 712 orang. Hal ini menunjukkan bahwa potensi SDM Desa Tirtoadi dilihat dari tingkat pendidikan sudah sangat baik. Selain itu, Desa Tirtoadi juga memiliki potensi ekonomi diantaranya adalah Potensi Wisata Agrowisata; Potensi Air dan Sumber Daya Air (Mata Air, Sumur Gali, Sumur Pompa, Sungai dan Embung); Hutan Desa; dan Potensi Kerajinan Bambu serta Potensi Peternakan.

Sementara itu, Masyarakat Desa Tirtoadi memiliki banyak usaha dagang barang dan jasa seperti jasa angkutan umum, jasa jahit menjahit, usaha madu lebah, biogas, telur asin dan Pengusaha Kerajinan Bambu. Banyaknya usaha yang ada di Desa Tirtoadi memberikan kontribusi bagi Pemerintah Desa yakni terbukanya lapangan kerja dan pengembangan potensi desa lainnya. Namun, permasalahan yang ada di Masyarakat Desa Tirtoadi adalah belum secara massif menggunakan teknologi dan informasi dalam aktivitas sehari-hari khususnya yang berkaitan dengan usaha dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana berbagai persoalan di atas, hal tersebut juga terjadi di Desa Tirtoadi bahwa masyarakat belum memiliki pengetahuan yang baik terkait SID. Selain itu, masyarakat belum dapat berpartisipasi dalam kegiatan desa. Berdasarkan permasalahan tersebut kami bermaksud untuk mengajukan usulan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk membantu pengelolaan SID untuk pengelolaan keuangan desa melalui Program *Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*.

Metode Pelaksanaan

Demi mendapatkan hasil yang maksimal maka pengabdian masyarakat PKM dengan tema Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ini menggunakan beberapa metode salah satunya adalah sebagai berikut:

Metode Kegiatan

Forum Group Discussion (FGD)

Forum group discussion salah satu metode yang kami gunakan, dengan adanya metode ini kami berharap mendapatkan informasi maupun data mengenai permasalahan Desa Tirtoadi. Sehingga dengan data yang kami dapatkan dari FGD tersebut akan kami tindak lanjuti kepada masyarakat terutama untuk mewujudkan pelayanan public yang baik.

Pelatihan

Pelatihan ini diberikan kepada perangkat Desa Tirtoadi terutama yang mengelola system informasi desa. Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan akan sangat membantu

pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan pelayanan public.

Hasil dan Pembahasan

Desa merupakan salah satu system pemerintahan di tingkat bawah, sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi bagi aparatur desa. Dengan adanya peningkatan kompetensi aparatur desa maka diharapkan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Jika kita lihat pada saat ini dimana semuanya berbasis teknologi informasi, begitupula dengan pemerintah desa yang semuanya harus menggunakan teknologi informasi. Akan tetapi yang paling banyak kelemahan ditingkat desa pada saat ini adalah mengenai kompetensi apratur desa dalam penggunaan teknologi informasi. Selain dalam hal teknologi informasi, pemerintah desa pada saat ini juga telah diberikan kewenangan otonomi oleh pemerintah pusaat, sehingga pemerintah desa bisa mengelola anggaran untuk kemajuan desanya. Oleh karena itu, perlu peningkatan kompetensi bagi aparatur desa baik dalam peningkatan kompetensi teknologi informasi maupun dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Maka dari itu banyak sekali sekarang desa-desa yang berada di Yogyakarta maupun sekitarnya menggunakan system informasi desa (SID) untuk mempermudah dan membantu pemerintah desaa dalam hal pengelolaan keuangan desa maupun kegiatan yang lainnya. Salah satu desa yang menginisiasi system informasi desa adalah Desa Tirtoadi, dimana di desa tersebut belum ada system informasi desa sehingga masih sangat membutuhkan sekali terutama untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya system informasi desa ini harapannya bisa mempermudah pemerintah desa dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan atau penggunaan keuangan desa baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah dan pusat. Terwujudnya system informasi desa ini juga tidak terlepas dari keinginan masyarakat dalam hal transparansi, baik transparansi penggunaan anggaran maupun pengelolaan kegiatan. Pada kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini ada beberapa hal yang bisa diberikan ke pemerintah desa untuk mendukung system informasi desa dalam hal peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diantaranya adalah sebagai berikut: *forum group discussion*, pembuatan website, dan workshop pengelolaan website ke aparatur desa.

a. Forum Group Discussion

Pada kegiatan *forum group discussion* yang kami lakukan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah mengenai sumber daya aparatur yang harus disiapkan dalam pengelolaan website atau system informasi desa. Adapun kegiatan yang dibahas pada acara tersebut adalah mengenai peningkatan skill sumber daya aparatur desa dalam pengelolaan sistem informasi desa. Hal ini merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dengan adanya sistem informasi desa yang telah dirancang tersebut diharapkan sangat membantu pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan, terutama dalam hal transparansi keuangan bagi masyarakat. Dengan adanya transparansi ini

akan meningkatkan *trust* masyarakat kepada pemerintah desa, selain itu juga dengan adanya sistem informasi desa ini pemerintah desa bisa lebih efektif, efisien dan akuntabel dalam pemberian pelayanan. Untuk menciptakan sistem informasi desa yang efektif maka langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa Tirtoadi adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur.

Gambar 1. Pelaksanaan FGD dengan Sekretaris Desa dan Perangkat Desa



Sumber: Dokumen penulis

Pada saat ini sistem informasi desa sangat dibutuhkan sekali oleh pemerintah desa, mengingat bahwa desa pada saat ini telah diberi otonomi oleh pemerintah pusat, sehingga desa bisa mengelola keuangan desa sesuai dengan rancangan yang telah dibuat setiap tahunnya. Maka dari itu untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan maka sistem informasi desa sangat diperlukan. Hal ini juga sangat memudahkan pemerintah desa, maupun pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam melakukan kontroling penggunaan anggaran maupun kegiatan. Dengan adanya sistem tersebut manfaat yang diterima oleh masyarakat maupun pemerintah desa sangat banyak sekali salah satunya adalah mengenai transparansi.

b. Workshop Pengisian dan Pengelolaan *Website*

Dengan diberlakukannya UU Desa maka desa di seluruh Indonesia diberi otonomi desa, sehingga desa bisa mengelola anggaran dana desa sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Dengan adanya pemberian otonomi melalui dana desa maka setiap desa diberi kebebasan dan dituntut untuk menjadi desa mandiri. Selain itu, di era globalisasi desa juga

dituntut untuk bisa bersaing dengan desa lain baik di dalam maupun luar negeri, serta desa dituntut untuk menggunakan teknologi informasi. Dalam era global ini penggunaan teknologi informasi masih sangat minim sekali terutama penggunaan teknologi informasi bagi pemerintah desa, akan tetapi hal ini tidak bisa di elakkan lagi, mengingat dengan banyaknya persaingan dan tuntutan tentang akuntabilitas dan transparansi. Maka mau tidak mau desa harus menggunakan teknologi informasi terutama system informasi desa.

Demi terwujudnya sistem informasi desa yang baik maka diperlukan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi. Maka dari itu, pemerintah Desa Tirtoadi bekerjasama dengan dosen Ilmu Pemerintahan UMY dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya aparatur. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah peningkatan skill sumber daya aparatur dalam pengelolaan system informasi desa. Salah satu saranan system informasi desa yang bisa digunakan adalah *website*, maka dari itu langkah awal yang dilakukan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan adalah melakukan pembelian *domain* untuk pembuatan *website* desa.

Langkah kedua yang dilakukan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan memfasilitasi sumber daya aparatur desa dalam hal pelatihan pengelolaan *website*. Dimana pelaksanaan pelatihan *website* dilakukan di Lab Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pelatihan pengelolaan *website* ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan skill aparatur desa, terutama untuk mendukung penggunaan system informasi desa di Desa Tirtoadi. Dengan adanya pelatihan ini akan sangat membantu sekali bagi pemerintah desa, dimana pemerintah desa akan bisa memaksimalkan sistem informasi desa dengan baik.

Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Website Desa



Sumber: Dokumen penulis

Dengan adanya system informasi desa maka tuntutan bagi desa di era globalisasi bisa terealisasi, selain itu juga penggunaan system informasi desa bisa membantu desa dalam hal asas transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya system informasi desa ini maka pemerintah desa sangat diuntungkan, karena transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa bisa dilakukan dalam system informasi desa tersebut. Dengan begitu maka pemerintah desa mendapatkan keuntungan besar dalam hal trust masyarakat yang diberikan kepada pemerintah desa. Selain itu masih banyak sekali keuntungan pemerintah desa yang didapat dengan adanya

system informasi desa, diantaranya adalah informasi agenda desa yang bisa di publikasikan melalui *website* desa dan lain sebagainya.

Dengan adanya *website* desa atau system informasi desa ini pemerintah desa mendapatkan kemudahan yang sangat luar biasa, salah satunya dalam hal publikasi kegiatan maupun potensi desa. Mengingat Desa Tirtoadi merupakan salah satu desa yang mempunyai banyak kegiatan dan mempunyai banyak potensi desa yang bisa digunakan atau manfaatkan dalam peningkatan pendapatan asli desa. Dengan adanya potensi yang dimiliki Desa Tirtoadi, maka pemerintah desa harus segera memikirkan pengembangan potensi kearah wisata. Dengan adanya pengembangan ini maka akan membantu pemerintah desa dan masyarakat Desa Tirtoadi dalam hal peningkatan kesejahteraan atau ekonomi.

Gambar 3. Potensi Desa Tirtoadi



Sumber: Dokumen penulis

Simpulan

Dari pelaksanaan pengabdian tersebut dapat dilihat bahwa sistem informasi desa sangatlah dibutuhkan oleh pemerintah desa. Hal ini untuk membantu pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Dengan adanya dampak globalisasi ini sistem informasi desa mulai diterapkan hal ini sangat membantu sekali bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mekanisme kontroling dan sistem pengawasan. Dengan adanya sistem informasi desa ini masyarakat dan pemerintah bisa memantau langsung penggunaan anggaran desa maupun akuntabilitas serta transparansi anggaran lain.

Selain itu sistem informasi desa juga memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam hal promosi potensi desa, mengingat Desa Tirtoadi merupakan desa yang mempunyai banyak potensi salah satunya adalah potensi kerajinan, potensi sumber daya alam melalui daerah persawahan dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem informasi desa ini maka potensi tersebut bisa dipublikasikan sehingga menjadi salah satu pendapatan asli desa (PADes). Selain pendapatan asli desa maka potensi tersebut juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tirtoadi.

Daftar Pustaka

Apa Dan Mengapa SID, Buku Oleh Combine Resource Institution, Februari 2012.

Buku Pintar Sistem Administrasi & Informasi Desa , Buku Oleh Australian Community Development And Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II, Januari 2014.

Kerangka Kerja Untuk Mengupayakan Satu Sistem Informasi Desa Yang Terintegrasi, Terbitan KOMPAK, Program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia, April 2017.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa